

Hasil Penelitian

No Registrasi: 771acc23794e4bf9b681450fb7f3e721

**PERAN MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT
(Studi Kasus Masjid Mitra Masyarakat Ekonomi Syariah Di Kabupaten Lombok Barat)**



TIM PENELITI

DR. HJ. ZULPAWATI, MA.

SALWA HAYATI, ME.

NADYA RIZKY ANANDA

**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid memiliki fungsi sentral dalam masyarakat karena umumnya masjid merupakan perwujudan aspirasi ummat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid dituntut sebagai *agent of social exchange* (Huda: 2007, 108). Disamping memiliki fungsi spritual, masjid diharapkan mampu memiliki fungsi ekonomi sehingga diharapkan masjid bisa ikut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di beberapa negara Islam yang telah maju, masjid terbukti memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakatnya. Namun seiring perjalanan waktu, diberbagai belahan dunia Islam, fungsi masjid cenderung menyempit, hal ini disebabkan oleh berbagai mitos yang berkembang sebagaimana yang diungkapkan oleh Robiatul Auliyah yang mengutip pendapat Rifai dan Hutomo, yaitu (1) mitos bahwa Allah swt sendiri yang menjaga masjid. Hal ini didasarkan kepada pernyataan dalam al Qur'an Surat al A'raf ayat 31-33 bahwa masjid adalah rumah Allah, maka logikanya jika masjid rumah Allah maka Allah sendiri yang menjaga dan memeliharanya; (2) mitos adanya berbagai larangan aktifitas di masjid selain aktifitas ibadah. Hal ini karena adanya anggapan sebagian besar ummat Islam bahwa masjid adalah tempat yang suci dan khusus untuk ibadah sehingga tidak boleh dicampuradukkan dengan aktifitas-aktifitas yang mengandung unsur sosial, politik, budaya dan ekonomi; (3) mitos adanya pandangan bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan masjid tidak memiliki keuntungan material sehingga orang cenderung melakukannya tidak secara serius. Mitos-mitos seperti tersebut di atas juga banyak diyakini di tengah-tengah masyarakat di Indonesia khususnya juga diyakini pada sebagian besar masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Auliyah: 2014, 74).

Guna mematahkan mitos-mitos tersebut, maka diperlukan sinergitas dan kerjasama semua pihak untuk kembali memakmurkan masjid sebagai sentral berbagai kegiatan dan aktifitas terkait kepentingan ummat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal inilah yang saat ini sedang digalakkan di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang ada.

Provinsi Nusa Tenggara Barat–khususnya Pulau Lombok – dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, merupakan salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di Indonesia dan dengan jumlah sarana ibadah (Masjid

dan Mushalla) terbanyak di wilayah Indonesia Timur. Hampir setiap kampung memiliki minimal 1-2 masjid dan antara 2-5 mushalla. Jumlah ini sangat potensial untuk diberdayakan dengan berbagai kegiatan dan program yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Jumlah sarana ibadah umat Islam di Provinsi NTB terbilang cukup banyak yaitu sebanyak 9.348 yang terdiri atas Masjid dan Mushalla. jumlah Masjid di NTB sebanyak 4.950 dan Mushalla sebanyak 4.398. Sebagian besar berada di Pulau Lombok, yaitu sebanyak 3.869 Masjid dan 3.984 Mushalla (Kemenag NTB: 2021). Adapun sebaran jumlah Masjid dan Mushalla di NTB dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Data sebaran Masjid dan Mushalla di NTB

Kabupaten/Kota	Masjid	Mushalla
Lombok Barat	676	666
Lombok Tengah	1267	452
Lombok Timur	1334	2585
Sumbawa	520	265
Dompu	262	79
Bima	98	35
Sumbawa Barat	176	23
Lombok Utara	329	223
Mataram	263	58
Kota Bima	25	12
Total	4.950	4.348

Di sisi lain, tingkat religiusitas masyarakat NTB tidak perlu diragukan lagi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikasi, selain dari jumlah sarana tempat ibadah yang sangat banyak, hal lainnya bisa dilihat dari tingginya semangat masyarakat NTB dalam menunaikan ibadah haji hingga menjadikan daftar tunggu ibadah haji menjadi semakin lama yaitu mencapai 35 tahun, terlama kedua setelah Kalimantan Selatan (kemenag.go.id: 2021).

Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan semangat melaksanakan ajaran Islam dalam bidang ekonomi, masyarakat NTB juga terbukti sangat semangat, hal ini dibuktikan dengan dikonversinya bank BPD plat merah milik Pemerintah daerah menjadi Bank NTB Syariah. Dalam menggalakkan semangat berekonomi

berlandaskan syariah, kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak sangat diperlukan, baik pemerintah, lembaga keuangan, dan juga organisasi kemasyarakatan dan profesi, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan sebuah perkumpulan/organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. MES pertama kali didirikan pada tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001, dan dideklarasikan pada 2 Muharram 1422 H di Jakarta. MES terus berkembang dan menjadi wadah yang inklusif untuk menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan terus berupaya untuk membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka membangun dan mengembangkan ekonomi syariah. Secara keseluruhan saat ini MES sudah terbentuk di 10 negara, 29 provinsi dan 104 kabupaten/kota se Indonesia salah satunya di NTB yang terbentuk sejak tahun 2019 (ekonomisyariah.org:2022).

Dalam pemberdayaan dan pemakmuran masjid, peran MES sangat diperlukan karena merupakan salah satu lembaga yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah provinsi NTB, OJK dan juga lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana model pemberdayaan dan sejauhmana tingkat keberhasilan program tersebut di masjid-masjid yang menjadi mitra MES di wilayah Lombok Barat.

A. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas fokus dalam penelitian ini, maka dirumuskanlah masalah yang akan diteliti dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana Mekanisme dan Pola Pemberdayaan Ekonomi Ummat yang dilakukan Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah di Kabupaten Lombok Barat?
3. Bagaimana analisis terhadap model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah di Kabupaten Lombok Barat?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peran Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat
2. Menggambarkan tentang Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Ummat yang dilakukan Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah
3. Menganalisis dan memetakan faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan ekonomi berbasis masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah

C. Kajian Pustaka

1. Kajian Teoritik

a) Pemberdayaan

Ach. Wazir mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan untuk memberikan masyarakat miskin keterampilan dan pengetahuan agar mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya (Wazir:1999, 30). Sedangkan menurut Prasodjo, pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pelatihan dan pendampingan agar seorang individu dapat berjuang untuk mengaktualisasikan dirinya (Wahyuningrum: 2014, 10).

Menurut Jim Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan bukan sekedar menyangkut kekuasaan politik, namun juga penguasaan klien atas beberapa hal antara lain (Ife: 1995, 64) :

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga, yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber, yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.

g. Reproduksi, yaitu kemampuan terkait proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Menurut Ismail Nawawi, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial Nawawi:2009, 144).

Tujuan pemberdayaan menurut Joko yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sehingga, pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjadikan masyarakat yang mandiri, berdaya, dapat mengadopsi inovasi dan memiliki paradigma masyarakat modern sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat (Sutarto:2007, 15).

Untuk mengoptimalkan pemberdayaan, terdapat beberapa indikator kunci yang menjadi syarat masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang telah diberdayakan, yaitu (Narayan: 2002, 14-18):

- a. mempunyai informasi yang kuat sehingga selalu mengetahui peluang yang ada;
- b. masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. akuntabilitas;
- d. dapat mempertanggungjawabkan semua dana yang sudah dapat dikelola masyarakat sendiri;
- e. masyarakat mampu mengorganisir kekuatan mereka sendiri, sehingga dapat memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah kepentingan umum.

b) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid

Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya, tetapi masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktifitas sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Ahmad Sutarmadi bahwa masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja, masjid memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan potensi lokal yang tersedia (Sutarmadi:2022,19).

Masjid merupakan wilayah/ medan dakwah dan bisa menjadi tempat yang sangat strategis dalam upaya mengajak masyarakat menuju cara hidup yang islami dalam segala aspek kehidupan, baik aspek kerohanian, maupun aspek sosial ekonomi, politik, budaya dan hukum yang ada di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan masjid, maka *community development* (pengembangan masyarakat) lebih tepat menggunakan bentuk *da'wah bi al-hal* karena lebih menekankan aspek pelaksanaan suatu program kegiatan daripada komunikasi lisan berbentuk ceramah. Ini berarti bahwa pengembangan masyarakat berkaitan erat dengan manajemen dakwah menyangkut perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Prinsip utama pembangunan masyarakat Islam adalah holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan, termasuk eksistensi komponen alam bukan manusia (*non human society*) (Mukhlisin:223).

2. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai masjid dan pemberdayaan ekonomi sudah banyak dilakukan baik dalam bentuk buku, jurnal, karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis maupun disertasi. Diantara beberapa karya tulis yang sudah dilakukan dan terkait dengan tema penelitian ini adalah:

1. Romi Wilham Sutanto mengkaji tentang “Pengembangan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Islam Islamic Center Kota Bekasi)”. Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan masjid terhadap layanan sosial, pendidikan dan ekonomi jamaahnya. Hasil penelitian ini adalah program pengembangan masyarakat yang dijalankan oleh Masjid adalah pembinaan karakter, pendidikan dan layanan penyembelihan hewan kurban dan juga penerimaan dan penyaluran ZIS (Sutanto:2019).
2. Asep Suryanto dan Asep Saepulloh menulis tentang, “Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya”. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki masjid dan potensi ekonomi jamaah masjid serta berupaya merumuskan model pemberdayaan ekonomi Masjid di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) potensi dana masjid setiap bulan antara Rp.400.000-Rp.1.000.000 yang bersumber dari infaq, wakaf, dan zakat harta, 2) potensi ekonomi jamaah masjid dikategorikan menjadi dua, yaitu mustahik dan muzakki, serta 3) perancangan model pemberdayaan ekonomi

yang dirumuskan adalah model terintegrasi antara lembaga ZIS, keuangan mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi (Suyanto:2016).

3. Ahmad Abdul Muthalib, menulis tentang "Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone". Kajiannya membahas tentang prospek kota Watampone sebagai salah satu kota mayoritas beragama Islam dalam pengembangan ekonomi masyarakat berbasis masjid, dimana selama ini masjid disana belum difungsikan secara optimal sehingga dibutuhkan koordinasi yang terencana antara pengurus masjid dan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan (Muthalib:2018).
4. Ade Iwan Ridwanullah dan Dedi Herdiana, mengkaji tentang "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid". Penelitian ini menekankan pada maksimalisasi fungsi masjid secara holistik sebagai media pembinaan umat dalam segala bidang dan menggambarkan masjid Raya at Taqwa Cirebon sebagai salah satu masjid yang bisa menghidupkan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang spritual keagamaan, ekonomi, pendidikan dan sosial (Ridwanullah:2018).
5. Rozanna Erziati, mengkaji tentang "Pemberdayaan Ekonomi potensial Masjid sebagai model pengentasan kemiskinan". Penelitian ini menggambarkan potensi pemberdayaan masjid di Banjarbaru sangat besar , namun belum dikelola secara maksimal sehingga dibutuhkan strategi-strategi untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kenyataan mealui optimalisasi infak, zakat dan shadaqah (Erziati: 2015).
6. Zulpawati, mengkaji tentang "Inovasi Produk Mawar Emas Berbasis Akad Qardh (Studi Community Development berbasis Masjid pada Pembiayaan Bank NTB Syariah)". Penelitian ini, lebih terfokus mengkaji inovasi akad Qardh yang digunakan Bank NTB Syariah dalam pembiayaan Mawar Emas yang diberikan kepada Masyarakat Berbasis Masjid (Zulpawati: 2021).

Dari berbagai literatur yang sudah diungkapkan di atas, terlihat memiliki fokus kajian yang hampir sama terkait masjid dan pemberdayaan ekonomi. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini terfokus kepada kajian terkait model program pemberdayaan ekonomi yang sudah dilakukan oleh Masjid-Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB di wilayah lombok Barat.

D. Metode Penelitian

Metode adalah tipe atau metode umum penelitian yang digunakan dalam perencanaan, persiapan dan penulisan suatu karya ilmiah. Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Disamping metode, keberhasilan suatu penelitianpun akan sangat bergantung kepada model pendekatan yang digunakan, karena nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Apabila pendekatan yang digunakan untuk suatu penelitian tidak tepat, maka penelitian itu menjadi tidak akurat, sehingga kebenaran hasil penelitiannya diragukan, bahkan bisa digugurkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell: 2013,4-5).

Creswell juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif bisa juga melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama, selain itu melibatkan pengumpulan data yang terbuka pula, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis jenis penelitian kualitatif ini, dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah yang sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan (ibid.).

Penelitian kualitatif juga menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam obyek penelitian. Data deskriptif merupakan data penelitian yang berusaha menggambarkan pemecahan masalah yang ada saat ini dengan berdasarkan data yang tersedia, menyajikannya, lalu menganalisisnya serta menginterpretasikan data tersebut (Ahmadi: 2010). Data tersebut merupakan data yang mendalam dan bermakna berdasarkan data yang sebenarnya (Sugiyono:2010).

Secara konkret penelitian ini menggambarkan model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di masjid-masjid mitra MES NTB di wilayah Lombok Barat. Dari

data tersebut kemudian dilakukan pemetaan dan analisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas terkait apakah masjid mitra MES NTB telah mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi jamaah masjid tersebut serta membantu mereka terlepas dari lilitan hutang rentenir.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan strategi pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu strategi penelitian di mana di dalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Studi kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktifitas, proses, dan program (Creswell: 2013).

Strategi pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menjawab model pemberdayaan ekonomi masjid mitra MES NTB, bagaimana kontribusi masing-masing pihak dalam program tersebut sehingga mampu memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi jamaah masjid tersebut.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, yaitu pengurus MES NTB, ta'mir masjid, dan ibu-ibu jamaah masjid/anggota majlis taklim yang menjadi peserta program pemberdayaan ekonomi. Dengan pelibatan semua unsur dalam penelitian ini, diharapkan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber data

Sumber data sangat penting karena mampu memberikan gambaran darimana data diperoleh (Arikunto: 1993, 62). Pada penelitian kualitatif, sumber data diperoleh peneliti dengan memasuki situasi tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang permasalahan tersebut (Sugiono:2009,210).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi awal guna melakukan pengamatan tentang masjid-masjid mitra MES di Lombok Barat serta mekanisme kerja dan alur program pemberdayaan ekonomi yang mereka terapkan. Dari hasil observasi awal peneliti mendapatkan gambaran sejumlah informan yang dapat dijadikan pintu masuk untuk memperoleh data awal yang diinginkan.

Pemilihan informan didasarkan kepada kriteria (Guba:1985); (1) mereka yang memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati,(2) mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti,(3) mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi,(4) mereka yang bisa memberikan informasi secara jujur, dan(5) informan tersebut tergolong masih asing bagi peneliti. Informan yang dipilih inilah yang menjadi :

Sumber Data Primer, sumber data yang diperoleh dari informan secara langsung, dalam hal ini adalah pengurus MES NTB, ta'mir masjid mitra MES NTB serta sampel ibu – ibu jamaah masjid/nasabah program pemberdayaan tersebut.

Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur yang dapat dipertanggungjawabkan ke ilmiahannya baik dalam bentuk buku-buku, tulisan di jurnal, hasil yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut yaitu :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dikenal juga dengan pengamatan langsung. Manfaat teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya (Meleong:2006,174). Observasi ini digunakan untuk mengamati kinerja para informan tentang mekanisme dan pola Pemberdayaan ekonomi yang diterapkan.

b. Wawancara

Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti akan melakukan wawancara, yaitu komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden (Sugiyanto:2007, 93). Wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interview*) dengan pengurus MES NTB, ta'mir masjid serta beberapa ibu–ibu jamaah masjid yang menjadi sampel sebagai perwakilan jamaah yang mengikuti program pemberdayaan tersebut.

c. Dokumentasi

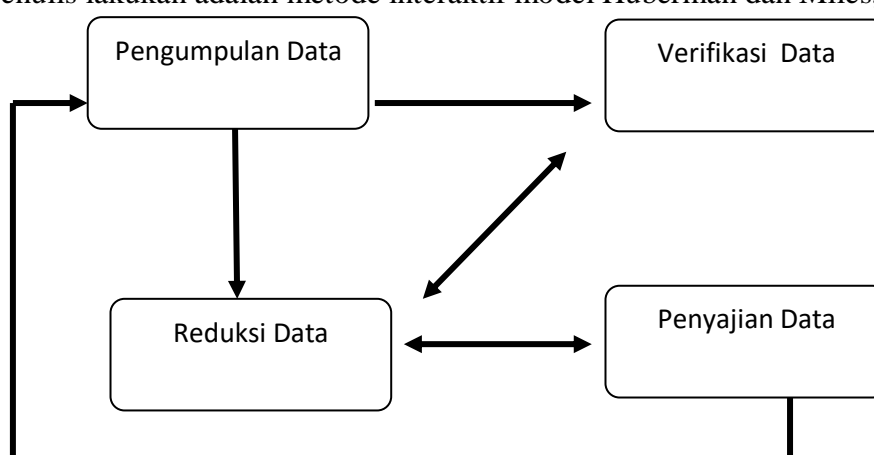
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi sangat diperlukan guna memperkuat pernyataan-

pernyataan informan yang terkait kajian yang diteliti. Adapun dokumen – dokumen pendukung yang diambil dari objek penelitian dan menjadi data pendukung utama adalah daftar ta'mir yang mengikuti pelatihan, data nasabah yang sudah realisasi, draft akad pembiayaan *qard*} Mawar Emas dan lain sebagainya yang terkait dengan obyek penelitian.

6. Teknik analisa data

Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip Nawawi mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain (Nawawi:2013,283).

Analisa data bersifat induktif yang pelaksanaannya melalui proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini proses analisa data yang penulis lakukan adalah metode interaktif model Huberman dan Miles, yaitu



a. Pengumpulan Data

Disebabkan keterbatasan waktu penelitian, maka data-data berupa catatan-catatan yang diperoleh di lapangan baik melalui proses teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, perlu di periksa dan direvisi kembali sebelum dimasukkan dalam transkrip data.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya (Nawawi:2013). Saat proses penelitian dilakukan, data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti, dengan menganalisa data yang diperoleh melalui reduksi data. Sehingga diperoleh peta gambaran yang jelas tentang data pola dan mekanisme Pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan berbagai pihak.

c. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan sebuah format visual yang menyajikan informasi secara sistematis, sehingga para pengguna dapat menggambarkan kesimpulan secara valid, guna pengambilan tindakan yang diperlukan. Tampilan data dibuat dalam bentuk tabel sehingga dapat diketahui dan dipahami dengan baik, sebagaimana data aslinya atau peristiwa empiris tersebut berinteraksi satu dengan lainnya secara nyata. Setelah itu dibuat suatu kesimpulan guna mempermudah pembacaan makna dari penampilan data tersebut, kemudian pembuatan laporan analisa data.

d. Verifikasi Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu pencocokan beberapa data dari beberapa sumber, cara dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini hanya digunakan triangulasi sumber dari teknik verifikasi data. Triangulasi sumber merupakan pencocokan data dari berbagai sumber. Penggunaan triangulasi ini dilakukan untuk menguji proses atau hasil penelitian sehingga bisa dipastikan sudah berjalan dengan baik, sebagaimana dikatakan Burhan Bungin sebagai berikut: pertama, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi dalam pengumpulan data, harus dipastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan informan serta catatan harian observasi. Kedua, setelah itu dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dengan catatan harian observasi. Apabila antara catatan harian kedua metode itu ada yang tidak relevan, peneliti harus mengkonfirmasi perbedaan itu kepada informan. Ketiga, hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau dari sumber-sumber lain. Apabila ada yang

berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber perbedaan dan materi perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain (Bungin:2003, 191).

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian. Pada Bab ini dikemukakan pula Kajian Teoritik, Penelitian Terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, Metode Penelitian yang digunakan, serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Konsepsi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat. Bahasan dalam bab ini dibagi dalam dua sub bahasan yaitu Definisi dan Konsepsi Pemberdayaan serta Konsep Pengembangan Masyarakat berbasis Ekonomi.

Bab Ketiga mengkaji tentang Peran Masjid Mitra Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah. Dalam bab ini akan dibahas tentang Profil Masjid Mitra MES dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kabupaten Lombok Barat, Polarisasi dan Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi di Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah serta Kontribusi para Pihak dalam program pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid.

Bab Keempat mengkaji tentang Analisis SWOT terhadap Pola Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Masjid Mitra Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Pembahasannya mencakup: Analisis Faktor Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid, Analisis Faktor Penghambat Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid, serta Kontribusi Program Pemberdayaan Ekonomi berbasis Masjid Terhadap Peningkatan Usaha Jamaah.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEPSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN MASYARAKAT

A. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau (*empowerment*) berasal dari kata "power" yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain merasa lemah dan melakukan apa yang kita inginkan, terlepas apakah mereka mampu atau bisa melakukan apa yang kita inginkan, atau itu dari keinginan dan minat mereka (Eddy Suharto: 2017, 57).

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah atau tidak tetap. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas dan diperlebar. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis sesuai keadaan.

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaidi:2007, 42).

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Senada dengan yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmitha, menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi (2008:77-78) dalam *buku Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna :(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Pada dasarnya, pemberdayaan terhadap masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok dan menyeluruh, sebagai bagian dari manifestasi eksistensi manusia. Oleh karena itu, masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara normatif atau kaku, yang menempatkan aturan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun keberadaan masyarakat secara pribadi, keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa sebagai manifestasi kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai norma dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu dalam kegiatan dan prinsip pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada orang lain dalam hal menambah wawasan dan menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat luas.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan manusia atau membangun dan mengembangkan kemampuan diri ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan secara terus menerus. Oleh karena itu, pemberdayaan atau peningkatan pengembangan masyarakat adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat luas. Ini artinya masyarakat diberdayakan untuk dapat melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat untuk kehidupan yang lebih layak. Oleh karena itu setiap aspek pemberdayaan diarahkan atau ditujukan untuk meningkatkan harkat martabat manusia sehingga menjadikan masyarakat yang maju dalam berbagai aspek lini kehidupan. Terdapat enam tujuan pemberdayaan (Mardikanto:2013,109).

1. Perbaikan Kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan/Tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaringan kemitraan

usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga Lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan. Lembaga yang baik mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas, semua anggota Lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada masing-masing anggota secara jelas dan tepat sesuai kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat atau ikut andil dalam kegiatan merasa berdaya atau mampu serta merasa memiliki peran dan tanggung jawab untuk memajukan Lembaga. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman yang dimiliki dan keterampilan yang meningkat dari waktu ke waktu.

2. Perbaikan Usaha

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan dan kemajuan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Disamping itu kegiatan dan perbaikann kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan dan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan memberikan mafaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh karena itu perbaikan yang dilakukan diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut. Sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan anggota.

3. Perbaikan Pendapatan

Perbaikan bisnis atau usaha diharapkan akan ada implikasi pada peningkatan pendapatan dari seluruh anggota Lembaga. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis atau usaha yang dilakukan maka diharapkan akan dapat memperbaiki peningkatan pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga.

4. Perbaikan Lingkungan

Lingkungan saat ini banyak mengalami kerusakan yang diakibat oleh ulah manusia itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Padahal kalau mereka mencerna jika kualitas manusia

itu tinggi, salah satu faktornya adalah memiliki Pendidikan yang tinggi atau memiliki kemampuan intelektual yang baik, maka manusia tidak akan melakukan sesuatu hal yang dapat merusak lingkungan sekitar seperti tidak menebang pohon yang dapat menyebabkan banjir dan longsor.

5. Perbaiki Kehidupan

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya tingkat Kesehatan, tingkat Pendidikan dan tingkat pendapatan yang bisa dilihat dari daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi atau hubungan dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Yang pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang baik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan keluarga dan masyarakat.

6. Perbaiki Masyarakat

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik dan layak, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

c. Prinsip- Prinsip Pemberdayaan

dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat , perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip, yaitu: 1). Prinsip kesetaraan 2). Prinsip partisipasi 3) Prinsip kemandirian 4). Prinsip berkelanjutan.

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan anatar masyarakat dengan anggota yang melakukan program pemberdayaan. Baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, prinsip kesetaraan yang dibangun dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman dan keahlian masing-masing. Maka setiap orang harus mengakui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki setiap individu. Sehingga terbentuk proses saling belajar, saling memahami, saling membantu satu sama lain, saling memberikan motivasi untuk kemajuan bersama dan saling mendukung dalam setiap hal. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pemberdayaan itu

mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat mendorong kemampuan dan kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tahap kemandirian tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang langsung melibatkan pendamping yang berkomitmen dan memiliki tujuan yang tinggi terhadap kemajuan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang ikut dalam kegiatan atau program pemberdayaan itu mendapatkan arahan dan bimbingan yang jelas dari para pendamping, sehingga masyarakat tersebut mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya demi kemajuannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Karena tujuan akhirnya masyarakat tersebut mampu secara mandiri untuk meningkatkan finansial mereka demi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

3. Prinsip Kemandirian (keswadayaan)

Prinsip kemandirian ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari bantuan orang lain. Prinsip ini sama sekali tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak mempunyai kemampuan akan tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit atau terbatas.

Mereka memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma atau aturan bermasyarakat yang sudah lama dimiliki dan dipatuhi. Yang semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pembentukan pemberdayaan. Bantuan dari orang yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat kemandirian. Dalam hal ini diharapkan peran pendamping secara maksimal untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan agar setiap individu mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk memecahkan masalah hidupnya seperti masalah sosial dan ekonomi. Hal ini diharapkan juga agar masing-masing individu dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya agar tidak tergantung kepada orang lain atau pihak manapun.

4. Prinsip Keberlanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang sebaik mungkin supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Namun secara perlahan dan pasti dengan beriringnya waktu peran pendamping makin berkurang, bahkan akhirnya ditiadakan, karena masyarakat sudah dapat mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan pada setiap individu yang terlibat secara langsung pada program pemberdayaan. Dalam hal ini diharapkan kepada masing-masing individu dapat menggali potensi yang mereka miliki demi memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan memadai (Nainggolan:2019,8-12).

d. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses pembentukan daya atau kemampuan masyarakat, dalam proses tersebut tentunya dilaksanakan secara bertahap supaya apa yang menjadi tujuan bisa terwujud, dan dalam pelaksanaannya tentunya tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah (Muslim:;2012, 33-34):

Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli terhadap lingkungan, diri dan keluarga, sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai

tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.

e. Indikator Hasil Pemberdayaan

Untuk mengetahui tujuan dari kegiatan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan bahwa seseorang yang ikut kegiatan pemberdayaan dikatakan berhasil/ berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program atau kegiatan pemberdayaan diberikan segenap upaya dan kemampuan yang dimiliki dapat difokuskan pada bagian-bagian apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dimaksimalkan.

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut andil memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, yang kuat dan lemah. Akan tetapi, Semua lapisan masyarakat berhak menikmati dan mengelola sumber daya yang ada.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

- Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Sumodiningrat:1999,138-139).

Selain itu, suatu program pemberdayaan bagi pengembangan kemampuan masyarakat tentunya memiliki beberapa indikator penentu keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Hasil dalam kegiatan pemberdayaan menurut Edi Soeharto adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal.(Suharto:2005,59-60): a). Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. b). Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. c). Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi. Untuk itu apabila semua ini terpenuhi dan bisa tercapai maka masyarakat tersebut dapat hidup dengan layak dan terbebas dari kemiskinan dan dapat berdaya saing dengan masyarakat lainnya.

B. Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat

a.. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan persamaan, pertanggung-jawaban, kesempatan pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik dan membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan

kekuatan atau sarana yang diperlukan dalam memberdayakan mereka (Zubaedi:2013,5-6).

Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya untuk menolong orang-orang lemah yang kurang mampu dan memiliki minat yang tinggi untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan. *Pertama*, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya kearah yang lebih baik serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 menjelaskan tentang Pengembangan. Dimana pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan norma dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Secara umum, pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbesar atau meningkatkan dan mengubah potensi-potensi yang dimiliki masyarakat kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, pengembangan masyarakat merupakan suatu upaya atau usaha meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui program-program pemberdayaan yang sudah direncanakan. Pengembangan masyarakat diharapkan berkesinambungan yang mencakup berbagai aspek kuantitas yang dimiliki masyarakat kearah yang lebih baik.

b.. Definisi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan Ekonomi masyarakat ialah bagaimana cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan perekonomian

masyarakat di dalam kehidupan yang diperoleh melalui berbagai usaha, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Sedangkan menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan dan perkembangan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan hak-hak dan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki (Ife:2008).

Maka dengan demikian pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok demi terwujudnya kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Strategi efektif dalam mewujudkan pengembangan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian motivasi, kemampuan intelektual dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat guna tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi dan lebih baik dari sebelumnya.

c. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Suatu usaha akan berhasil atau terwujud apabila memiliki strategi yang bagus dan matang, begitu juga halnya dengan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat akan berhasil apabila didukung dengan strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa macam strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain:

- *Direct Contact* (bertatap muka langsung dengan sasaran).

Metode ini adalah digunakan dengan cara menyampaikan secara langsung ide-ide khusus dan cara memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini dipandang dapat memotivasi dan merangsang pikiran masyarakat kalau mereka mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Selain itu strategi ini menjadikan masyarakat berfikir luas kalau lebih baik mereka sendiri yang memecahkan masalah yang mereka hadapi.

- *Demonstrasi Hasil* yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan dengan cara-cara yang mereka ketahui dan yang sudah diajarkan. Hasil yang bagus akan didapatkan apabila masyarakat mengerjakannya dengan cara mengikuti cara-cara yang mereka bisa yang diajarkan sebelumnya.

- Demonstrasi Proses adalah menunjukkan kepada orang lain bagaimana meningkatkan sesuatu yang mereka mampu kerjakan sekarang atau mengajari mereka menggunakan sesuatu alat baru yang sebelumnya mereka belum ketahui dan pahami.
- Paksaan Sosial adalah merupakan strategi yang dengan metode tertentu yang menjadikan suatu situasi tertentu yang memaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan (Sumodiningrat:2008,55).

Strategi pengembangan masyarakat merupakan suatu solusi agar masyarakat mampu berdiri sendiri melakukan hal-hal yang mereka inginkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bergantung kepada institusi atau pemerintah.

d. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan pelatihan atau pembelajaran sebagai bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha yang luas. Adapun langkah-langkah tersebut adalah.¹

- Pelatihan usaha, melalui pelatihan masyarakat diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bidang usaha serta proses-proses yang dihadapi dalam berusaha dengan segala seluk beluk yang ada dalam usaha. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dan meningkatkan pengembangan jaringan kemitraan dalam berusaha
- Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empiric. Dengan demikian diharapkan bagi masyarakat untuk mengetahui usaha apa yang harus dilakukan yang sesuai sumber daya dan potensi yang mereka miliki
- Penyusunan proposal, sebagai pedoman dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik dengan berbagai Lembaga perekonomian. Dengan terjalinnya Kerjasama yang baik dengan Lembaga perekonomian hal ini membuktikan bawah masyarakat tersebut udah berkembang dan

¹ Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, of.cit hal. 61

mampu berdiri sendiri tanpa harus mengharapkan bantuan pemerintah.

- Permodalan, yang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Yang paling penting adalah skill dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang sudah kompeten dibidangnya yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
- 5 Jaringan bisnis, sebagai upaya konsistensi, keberlanjutan usaha yang berkesinambungan maka dibutuhkan jaringan bisnis yang semakin luas yang akan dilaksanakan.

e. Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Didalam konsep pengembangan masyarakat terkandung kata pemberdayaan (*empowering*) yaitu upaya untuk membuat masyarakat berdaya dan mampu. Kegiatan Pemberdayaan menjadi prinsip dasar dalam mengembangkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan adalah salah satu upaya atau usaha yang ingin dicapai untuk dalam hal keberlanjutan setiap program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan dua konsep yang tidak bisa terpisahkan karena saling berkaitan satu sama lain, yang setiap programnya berasal dari inisiatif masyarakat itu sendiri yang bekerja secara optimal. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upaya sendiri.

Menurut Baonewidjojo, menyimpulkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu (Padangaran:2011, 29):

- Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat,
 - Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
- Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri.

- Membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan pokok baik individu maupun masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dengan pengembangan ekonomi masyarakat, diharapkan masyarakat mampu mengolah sumber daya dan asset yang mereka miliki dengan keberlangsungan hidupnya.

BAB III

PERAN MASJID MITRA MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI JAMAAH

A. Profil MES NTB dan Masjid Mitra MES NTB dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kabupaten Lombok Barat

Masjid dapat menjadi sentral kekuatan masyarakat. Dimasa lalu, pada masa Nabi, masjid dapat diperankan secara maksimal sebagai sentral masyarakat Islam untuk berbagai kegiatan. Pada saat sekarang masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah/pembinaan iman/taqwa, sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan dan pembinaan SDM serta pengembangan ekonomi. Umumnya dari empat fungsi ini hanya yang pertama saja yang terlaksana sementara fungsi lainnya belum optimal (Sutarmadi:2015).

Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut perlu dilakukan identifikasi untuk meningkatkan kapasitas masjid dan pengurusnya untuk mampu menjalankan fungsinya. Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid sangat diperlukan sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi, maka sudah barang tentu masjid yang memiliki ekonomi potensial dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan sebuah perkumpulan/organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. MES pertama kali didirikan pada tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001, dan dideklarasikan pada 2 Muharram 1422 H di Jakarta. MES terus berkembang dan menjadi wadah yang inklusif untuk menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan terus berupaya untuk membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka membangun dan mengembangkan ekonomi syariah. Secara keseluruhan saat ini MES sudah terbentuk di 10 negara, 29 provinsi dan 104 kabupaten/kota se Indonesia (www.ekonomisyariah.org).

MES wilayah NTB terbentuk dan diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Baiq Mulianah, M.Pdi selaku Ketua dan Najamudin Amy, MM selaku sekretaris umum serta beberapa pengurus lainnya yang memiliki berbagai *background* pendidikan

dan pekerjaan yang berbeda namun satu dalam visi dan misi yaitu membumikan ekonomi syariah di NTB.

Sebagai bagian dari upaya membumikan ekonomi syariah dan memakmurkan masjid, MES NTB menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah provinsi NTB dan juga dengan otoritas keuangan, melalui gerakan pemberdayaan ekonomi syariah dan gerakan membasmi praktik rentenir berbasis masjid yang kemudian dikenal dengan program MAWAR EMAS (Melawan rentenir Berbasis Masjid).

Mawar Emas merupakan program pemberdayaan jamaah masjid dengan cara memberikan bantuan pembiayaan modal usaha kepada jamaah yang terpilih dengan menggunakan akad qardh, dimana jamaah diberikan sejumlah pembiayaan secara cuma-cuma, hanya wajib mengembalikan pokoknya saja dengan persyaratan yang sangat mudah dan ringan.

Sebagai langkah awal, MES NTB melakukan identifikasi dan pemilihan masjid-masjid yang akan menjadi mitra MES NTB dalam program Mawar Emas ini. Menurut Supiandi (2022), Penentuan masjid ini didasarkan kepada beberapa kriteria, yaitu di antaranya: 1) masjid yang aktif melaksanakan kajian/pengajian mingguan; 2) masjid yang ta'mir nya aktif di masjid dan dekat dengan warga jamaahnya dan bersedia mengikuti pelatihan ta'mir; dan 3) didahulukan masjid yang ada pengurus MES yang menjadi jamaahnya, supaya koordinasi dan pendampingannya menjadi lebih baik.

Berdasarkan kriteria tersebut, untuk kabupaten Lombok Barat, terpilihlah 5 (lima) masjid yang menjadi mitra MES NTB dalam program pemberdayaan ekonomi Jamaah, atau yang dikenal dengan Mawar Emas, yaitu :

1. Masjid Nurul Falah, Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar
2. Masjid Baital Afwalah, Desa Nyiur Lembang Kecamatan Lembar
3. Masjid al Ikhlas Mastoen Mavilla Kecamatan Labuapi
4. Masjid Baitul Atiq Kecamatan Gerung
5. Masjid Muhajirin, Karang Bongkot Kecamatan Labuapi

Masing-masing takmir dari 5 (lima) masjid tersebut kemudian diberikan pelatihan oleh MES NTB bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK NTB dan Bank NTB Syariah terkait tata kelola masjid dan juga tentang ekonomi syariah. Sehingga setelah pelatihan ini, para takmir masjid tersebut memiliki pengetahuan yang baik tentang tata kelola masjid dan juga tentang perannya dalam program Mawar Emas.

Berdasarkan penuturan dari takmir masjid Nurul Falah, Junaidi (2022), sebelum pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jamaah yang dikenal dengan nama Mawar

Emas dilaksanakan, dia terlebih dahulu diberikan pelatihan selama 3 hari oleh MES NTB. Setelah itu, sebagai takmir masjid, pak Junaidi diminta untuk mensosialisasikan ke jamaahnya mengenai Mawar Emas, dan melakukan seleksi awal terhadap jamaah yang berminat.

Pak Jun menjelaskan bahwa, sejak periode pertama tahun 2020 yang lalu, pada awalnya hanya ada 1 kelompok yang terdiri dari 19 orang jamaahnya yang bisa mendapatkan program Mawar Emas tersebut, tetapi sekarang, setelah memasuki tahun ketiga, sudah ada 3 kelompok yang terbentuk, dimana ada 54 orang yang sudah bisa mengikuti program Mawar Emas tersebut. Pada tahap awal, masing-masing jamaah diberikan pembiayaan sejumlah masing-masing 1 juta, setelah satu tahun, dan mereka masih lulus secara administrasi dan keuangan, maka kemudian jumlah pembiayaan Mawar Emas yang diberikan meningkat menjadi 2 juta dengan tetap menggunakan akad qard.

Sebagai bagian integral dari program Mawar Emas tersebut, Masjid Nurul Falah rutin melaksanakan gerakan subuh berjamaah dan pengajian setiap ahad pagi. Di sela-sela kegiatan tersebut, para jamaah bisa membawa uang setoran cicilan yang dikumpulkan kepada masing-masing ketua kelompoknya atau ke bendaharanya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh pak Junaidi, demikian juga hal nya yang dikemukakan oleh pak Arief, takmir masjid al Muhajirin Karang Bongkot Labuapi. Jamaahnya bisa mengakses program pembiayaan Mawar Emas karena ada warganya yang menjadi pengurus MES NTB dan juga pegawai bank NTB Syariah. Sehingga hal itu bisa memudahkan koordinasi dan pengawasan program. Pada tahap awal, ada 40 orang jamaahnya yang bisa mengakses pembiayaan tersebut dan terbagi menjadi 2 kelompok. Setoran dilakukan setiap minggu pada saat kajian hari ahad sore. Jumlah setoran jamaah anggota bervariasi sesuai kemampuan mereka. Setiap jamaah diberikan bantuan modal usaha sebesar 1 juta dengan menggunakan akad qard.

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh para takmir masjid mitra MES NTB lainnya, yaitu Pak Ahsan takmir masjid baital Afwal Nyiur Lembang, pak Suhaili takmir masjid Baitul Atiq Gerung dan pak Samsuddin takmir masjid al Ikhlas Mavilla Labuapi. Bahwa dengan adanya program Mawar Emas ini, menjadikan masjid menjadi sentral kegiatan ummat, tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hal pengembangan ekonomi Ummat, terkhusus para jamaahnya.

B. Polarisasi dan Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi di Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah

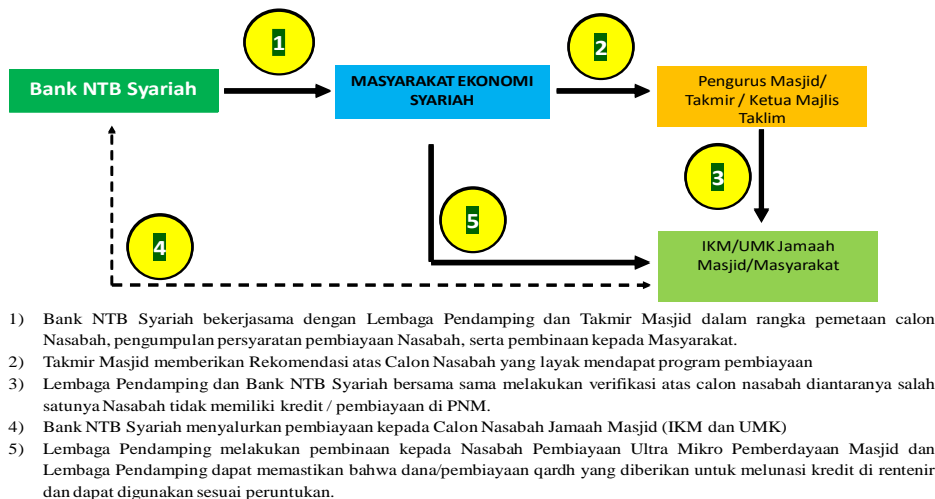
Pemberdayaan ekonomi masjid mitra MES NTB yang bertajuk Mawar Emas, merupakan program yang khusus diluncurkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank NTB syariah dengan memberikan pembiayaan khusus kepada jamaah-jamaahnya masjid tersebut yang telah terverifikasi dan memenuhi syarat, diantaranya tidak memiliki pembiayaan di bank atau lembaga keuangan lainnya.

Sebagai sebuah produk yang baru, pembiayaan Mawar Emas memiliki sistem dan mekanisme penyaluran yang berbeda bila dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya, baik pembiayaan yang menggunakan skim jual beli, bagi hasil, maupun dengan pembiayaan yang menggunakan akad yang sama (qardhul hasan)

Pembiayaan Mawar Emas merupakan pembiayaan ultra mikro yang khusus diluncurkan oleh Bank NTB Syariah dengan menggunakan akad qardh. Sasarannya adalah para jamaah masjid khususnya ibu-ibu yang sudah terjerat dengan hutang riba di rentenir, ataupun yang tidak memiliki hutang namun sangat membutuhkan bantuan modal usaha tambahan.

Untuk memperjelas pola penyaluran pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

POLA PENYALURAN PEMBIAYAAN



Sebagaimana yang tertera pada gambar, bahwa pada produk Mawar Emas pola yang terjadi adalah Bank NTB Syariah menjalin kerjasama dengan MES NTB dan Ta'mir Masjid dalam rangka penyaluran pembiayaan Mawar Emas. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses pembiayaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pak Rahmatullah, Divisi RTM bank NTB Syariah, bahwa produk pembiayaan Mawar Emas merupakan produk baru dari Bank NTB Syariah. Pembiayaan ini mulai diluncurkan tahun 2020 dengan tahap awal dana yang disediakan sebesar Rp. 1 Milyar (Satu Milyar rupiah) per tahun dengan target nasabah sebanyak 1000 orang. Hingga September 2022, bank NTB Syariah sudah menggelontorkan sebanyak 1,37 milyar untuk pembiayaan Mawar Emas, dengan total 1.279 jamaah masjid sebagai penerima manfaat.

Ketentuan produk pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah adalah peruntukannya yang dikhususkan untuk kalangan ibu-ibu jamaah masjid/ majelis taklim yang sudah memulai usaha kecil-kecilan ataupun yang belum memiliki usaha karena keterbatasan modal yang dimiliki tetapi mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk memulai usaha. Untuk menjembatani kepentingan masyarakat khususnya jamaah masjid dari kalangan ibu-ibu yang tidak bisa mengakses permodalan ke perbankan secara langsung, maka Bank NTB Syariah dalam hal ini memberikan pelayanan produk pembiayaan berupa produk pembiayaan Mawar Emas.

Divisi RTM, sebagai pihak yang menangani langsung pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah menjelaskan bahwa, plafond pembiayaan Mawar Emas dari Bank NTB Syariah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap orang dengan menggunakan akad *qardh*. Ada tiga ketentuan utama terkait penggunaan dana pembiayaan Produk Mawar Emas tersebut, yaitu:

- a. Untuk membantu masyarakat menyelesaikan pembiayaannya pada rentenir;
- b. Sebagai tambahan modal untuk usaha yang sudah dimiliki jamaah masjid/ majlis taklim, atau bisa juga menjadi modal awal bagi jamaah yang betul-betul mau berusaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
- c. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan konsumtif.

Selain ketentuan penggunaan dana tersebut, ketentuan lainnya adalah bahwa Setiap jamaah ibu-ibu calon penerima pembiayaan Mawar Emas dikelompokkan oleh ta'mir masjidnya masing-masing, antara 10 orang – 20 orang per kelompoknya, dan setiap kelompok memiliki struktur yang jelas, yakni ada ketua kelompok, sekretaris dan bendahara. Pengelompokan didasarkan atas kedekatan lokasi rumah supaya lebih mudah untuk berkoordinasi.

Disamping itu, setiap nasabah pembiayaan Mawar Emas, wajib mengikuti kajian dan pembinaan mingguan yang dilakukan oleh ta'mir masjid bekerjasama dengan MES NTB. Momen ini sekaligus dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan menyerahkan setoran/ cicilan

mingguan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ibu Satia Sari, salah seorang nasabah Mawar Emas:

Program pembiayaan Mawar Emas ini memiliki aturan bahwa setiap ibu-ibu yang ikut program ini, ditekankan untuk selalu mengikuti kajian mingguan dan materi kajian serta narasumber kajiannya berbeda-beda. Materi kajiannya sangat beragam, terkait bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga, tentang ilmu berumah tangga, tips mendidik anak, bagaimana mencari rizki yang halal, tentang ibadah, dan lain sebagainya. Di masjid kami kajian ini dilaksanakan setiap Jumat sore ba'da ashar jadi tidak mengganggu jadwal jualan kami yang pagi hari. Kajian ini tidak bersifat eksklusif, bisa juga diikuti oleh ibu-ibu komplek yang tidak dapat pembiayaan Mawar Emas. Tapi kalau kami yang dapat pembiayaan Mawar Emas, selesai kajian, wajib setor cicilan... itu saja bedanya”.

Pengembalian pembiayaan dalam bentuk cicilan mingguan harus diserahkan oleh masing-masing ketua kelompok kepada ta'mir masjid, dan nantinya takmir masjid akan setorkan kepada petugas Bank NTB Syariah. Setiap bulan petugas Bank NTB Syariah akan mengambil setoran tersebut ke ta'mir masjid masing-masing sesuai wilayah tempat tinggal nasabah yang sudah memperoleh pembiayaan nasabah tersebut.

Terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah juga tidak terlalu susah, di antara beberapa persyaratan untuk memperoleh pembiayaan Mawar Emas yaitu:

- a. Merupakan ibu-ibu jamaah masjid yang sudah lulus wawancara yang dilakukan oleh ta'mir masjidnya.
- b. Merupakan warga di sekitar masjid yang mendapat program pembiayaan Mawar Emas dan ta'mir nya sudah mengikuti pelatihan untuk ta'mir masjid pendamping program Mawar Emas.
- c. Diusulkan oleh takmir masjid atau ketua majlis taklim serta mendapat rekomendasi tertulis dari MES NTB.
- d. Wanita, minimal usia 20 tahun, dan tidak ada batas maksimal usia, yang penting ibu-ibu tersebut masih produktif dan mau berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
- e. Fotocopy E-KTP dan Pasangan / orang tua
- f. Fotocopy Kartu Keluarga
- g. Pas Foto 3x4 (1 pcs)
- h. Diutamakan yang memiliki hutang pada rentenir.
- i. Tidak sedang memiliki pembiayaan pada PT. PNM
- j. Memiliki tabunganKu Bank NTB Syariah.

k. Nasabah/pasangan diutamakan adalah anggota majlis taklim atau jamaah masjid

l. Mengisi form/ formulir permohonan pembiayaan (di siapkan Bank).

Umumnya, untuk menentukan seseorang layak tidaknya untuk diberikan pembiayaan, maka lembaga keuangan syariah akan melakukan penilaian terhadap permohonan pembiayaan tersebut sesuai teori yang diungkapkan Yusuf (1995), yaitu dengan berpedoman pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*).

Tujuan dari analisis penilaian 5C ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada perbankan syariah bahwa nasabah yang akan dibiayai memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya, memiliki sumber permodalan sendiri dan kemampuan menjalankan usahanya sekaligus kemampuan mengembalikan pinjaman, serta ada jaminan yang bisa digunakan jika terjadi kegagalan atau kredit macet.

Pada produk Mawar Emas, untuk menentukan jamaah mana yang berhak memperoleh pembiayaan, langkah awal yang digunakan oleh Bank NTB Syariah dalam melakukan penilaian *personal* terhadap calon nasabah adalah dengan melibatkan secara penuh Ta'mir Masjid dan juga MES NTB. Penilaian 5C yang diterapkan oleh Bank NTB Syariah sebagiannya didelegasikan kepada lembaga Ta'mir dan juga MES NTB. Untuk penilaian *Character* (personality/ watak), *Capital* (Modal) dan *Capacity* (kemampuan berusaha), Bank NTB Syariah menyerahkan sepenuhnya kepada Ta'mir dan MES NTB yang menentukan, namun tetap di pantau oleh Bank NTB Syariah melalui SLIK OJK. Sedangkan untuk penilaian *Collateral* (Jaminan), Bank NTB Syariah menerapkan sistem tanggung renteng, tidak ada jaminan dalam bentuk dokumen surat berharga (sertifikat dll.).

Pada akhirnya, setelah semua ketentuan persyaratan dan penilaian dari pembiayaan Mawar Emas terpenuhi, maka proses selanjutnya adalah Realisasi pembiayaan. Tahapannya adalah ta'mir masjid mengumpulkan ibu-ibu penerima pembiayaan Mawar Emas di masjid seraya menunggu pihak dari Bank NTB Syariah datang untuk mencairkan dana pembiayaan pembiayaan tersebut. Pada saat pihak Bank NTB Syariah sudah datang, langkah pertama adalah meminta ibu-ibu penerima pembiayaan tersebut untuk membaca dan menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan Mawar Emas yang sudah dibubuhi materai. Setelah semua proses administrasi selesai, maka pihak Bank NTB Syariah membagikan buku tabunganKu Bank NTB Syariah atas nama masing-masing nasabah yang sudah terisi uang sesuai nominal pembiayaan yaitu Rp. 1.000.000. Pihak Bank NTB Syariah juga memfasilitasi bagi setiap nasabah menarik uang pembiayaan yang ada di rekening tersebut saat itu juga. Adapun biaya administrasi sebesar Rp.20.000 untuk biaya materai, foto copy dan lainnya, termasuk juga

biaya asuransi sebesar Rp. 50.000 bisa dibayar saat itu juga atau bisa juga diangsur mengikuti jadwal angsuran pokok pembiayaan Mawar Emas.

Angsuran dibayarkan setiap minggu selama satu tahun sejumlah Rp. 22.750 (Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga dalam satu tahun dana yang disetor sejumlah 1 juta sesuai dengan nominal awal yang dipinjam tanpa ada kelebihannya. Dari saat pencairan sampai satu bulan pertama, ibu-ibu diberikan keringanan berupa penundaan dimulainya setoran. Sehingga kewajiban memulai mencicil setoran setiap minggu baru akan dimulai pada bulan berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar ibu-ibu tersebut bisa memaksimalkan seluruh pembiayaan tersebut sebagai modal usaha dan bisa diputar selama satu bulan pertama tanpa repot memikirkan setorannya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, sebagian besar ibu-ibu jamaah penerima pembiayaan Mawar Emas menyetor tabungan mingguan ke ta'mir masjid masing-masing kadang melebihi dari ketentuan nominal cicilan yang harus dibayarkan. Hal ini sebagaimana diakui oleh salah seorang nasabah yang peneliti wawancarai:

Setoran wajib mingguan kami adalah Rp.22.750. tapi saya dan juga beberapa teman kelompok saya yang lain, saya lihat juga banyak di antara mereka yang menyetor lebih dari jumlah tersebut. Kadang yang saya setor sejumlah Rp.30.000, kadang Rp. 35.000, kadang Rp.40.000 sesuai jumlah keuntungan yang bisa saya sisihkan di minggu tersebut. Hal ini sebagai tabungan saya yang sekalian saya simpan di rekening saya dan bisa saya gunakan untuk tambahan modal berikutnya”.

Untuk memperjelas model pembiayaan Mawar Emas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Spesifikasi Pembiayaan Mawar Emas

Nama produk	Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid (Mawar Emas)
Jumlah Pembiayaan	Rp. 1.000.000
Akad yang digunakan	<i>Qard</i> }
Sumber Dana	Komersil
Sasaran	Ibu-ibu Jamaah masjid/Majelis Taklim
Jangka Waktu	12 bulan
Sistem Pembayaran	Cicilan Mingguan
Nominal Cicilan	Rp. 22.750
Agunan	Tanpa Agunan, tetapi pemohon harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari

	Takmir masjid, Ketua Majelis Taklim dan atas sepengetahuan pihak MES serta harus mengikuti program pembinaan dan pelatihan secara rutin yang diadakan pihak MES.
Biaya-Biaya	Rp. 20.000 biaya administrasi (materai, foto copy, dan cetak buku tabunganKU Bank NTB Syariah) serta Rp. 50.000 untuk biaya asuransi.

C. Kontribusi para Pihak dalam program pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid.

Mawar Emas merupakan produk pembiayaan khusus dan melibatkan tidak hanya antara nasabah dengan Bank NTB Syariah, tetapi juga melibatkan pihak/lembaga lain sejak proses awal hingga pembiayaan tersebut berakhir. Keterlibatan lembaga lain dalam proses pembiayaan ini merupakan suatu proses yang baru dan inovatif, dan belum pernah diterapkan dalam jenis pembiayaan lainnya di Bank NTB Syariah dan bahkan di bank syariah lainnya di NTB. Beberapa lembaga/pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan Mawar Emas ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB.

MES NTB ikut terlibat secara aktif dalam mensukseskan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang lebih dikenal dengan nama Mawar Emas (Memberantas Rentenir Berbasis Masjid). Di antara beberapa tugas MES NTB dalam tersebut adalah (Supiandi:2022):

- 1) Melakukan asesment lapangan untuk menentukan masjid-masjid mana saja yang dinilai layak untuk memperoleh pelatihan sehingga jamaahnya berhak memperoleh pembiayaan Mawar Emas.
- 2) Memberikan pelatihan terhadap ta'mir masjid. Setelah masjid yang dinilai layak untuk memperoleh pembiayaan sudah ditentukan, MES kemudian mengundang masing masing 1 (satu) - 2 (dua) orang ta'mir dari setiap masjid tersebut untuk mengikuti pelatihan dan pembekalan mengenai program dan strategi memakmurkan masjid dan juga materi pendampingan program Mawar Emas. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari 2 malam dengan melibatkan OJK NTB, BI Perwakilan NTB, Bank NTB Syariah,

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten tempat lokasi yang menjadi sasaran program pembiayaan Mawar Emas. MES NTB sendiri menjadi koordinator sekaligus menanggung jawab program pelatihan ta'mir masjid ini. Tugas MES NTB mulai dari a) menentukan masjid sasaran; b) memilih 1-2 orang ta'mir dari setiap masjid yang menjadi sasaran; c) menyusun jadwal dan rundown acara pelatihan; d) dan menerbitkan sertifikat bukti pelatihan terhadap setiap ta'mir masjid yang menjadi peserta pelatihan

- 3) Memberikan rekomendasi tertulis terhadap nama-nama jamaah yang layak memperoleh pembiayaan Mawar Emas untuk kemudian surat rekomendasi tersebut dibawa ke Bank NTB Syariah sebagai salah satu syarat pencairan pembiayaan Mawar Emas.
- 4) Bersama-sama dengan ta'mir masjid yang sudah dilatih, MES NTB aktif melakukan pendampingan terhadap jamaah yang merupakan nasabah pembiayaan Mawar Emas. Melakukan evaluasi atas penyaluran pembiayaan ultra mikro (Mawar Emas) bersama para takmir dan Bank NTB Syariah.

Adapun mengenai sumber pendanaan MES NTB dalam melaksanakan semua kegiatan terkait dengan program pembiayaan Mawar Emas, pendanaannya bersumber dari dana bantuan OJK NTB, BI NTB, dan Pemprov. NTB serta bersumber dari dana operasional MES NTB (Suiandi:2022).

Antusiasme Jamaah masjid dan juga ta'mir masjid terhadap program Mawar Emas sangat besar. Hal ini tercermin dari daftar antri (*waiting list*) permohonan yang masuk ke MES NTB sangat banyak, sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Andi Supiandi:

b) Ta'mir Masjid

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembiayaan Mawar Emas, dan bahkan menjadi garda terdepan yang sangat menentukan berhasil/tidaknya program pembiayaan ini, maka peran yang diemban oleh ta'mir masjid menjadi sangat penting dan tidak boleh dianggap sepele.

Ta'mir masjid berfungsi sebagai pendamping program pembiayaan Mawar Emas. Untuk menjadi pendamping program tersebut, maka para ta'mir harus terlebih dahulu diberikan pelatihan sebagai bekal pendampingan dan memiliki pengetahuan tentang tata kelola masjid dan keuangan syariah.

Adapun materi-materi pelatihan yang diberikan kepada para ta'mir selama 3 hari tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Materi Pelatihan Ta'mir Masjid

Hari	Materi	Narasumber
Hari ke-1	Peran dan Fungsi Masjid Dalam Perdaban Islam	Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag.
	Keutamaan Memakmurkan Masjid (Pendekatan Ekonomi dan Islam)	Prof. Dr. Mansur Afifi, M.Sc.
	Potensi Dana Sosial Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat	Dr. Suwandi, M.Ec.
Hari ke-2	Pengenalan Aplikasi Masjid Smart Masjid	Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.
	Succes Story: 1. BWM ATQIA 2. Koperasi Syariah	BWM ATQIA (Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I) dan Ketua Asosiasi Koperasi Syariah (M. Nasir Jaelani, SE)
	Manajmen Masjid dan Takmir Menuju Kemandirian Masjid	Dr. H. Zaidi Abdad., M. Ag
	Strategi Bisnis –Manajmen UMKM	Dr. Muhamad Ali., M.Si
	Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah Model Bisnis – Legalitas	Dr. Muhaimin, SH., MH
	Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Ummat	Ir. Achris Sarwani, MPP (Kepala BI NTB)
	Manajemen OperasionalPengelolaan Keuangan	Dra. Dewi Yani Wahyuti, MM
	Penjelasan Program Secara Keseluruhan	Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I
Hari ke-3	Literasi Keuangan Syariah Berbasis Masjid	Kepala OJK NTB

	Pemberdayaan Ekonomi Ummat dengan Sistem Perbankan Syariah	Direktur Utama Bank NTBS
	Teknik Penyampaian Laporan dan Pembukaan Rekening oleh Bank NTBS	Bank NTB Syariah

Para ta'mir masjid yang sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh MES NTB, memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, di antaranya yaitu:

- 1) Selesai pelatihan, setiap ta'mir masjid berkewajiban melakukan sosialisasi mengenai program Mawar Emas terhadap jamaah dan warga dilingkungannya masing-masing serta melakukan penjaringan dan seleksi awal terhadap ibu-ibu yang merupakan jamaah masjid mereka, yang dinilai layak dan memiliki potensi untuk memperoleh pembiayaan Mawar Emas tersebut.
- 2) Ta'mir masjid melakukan seleksi awal berupa wawancara untuk menentukan siapa yang berhak menerima pembiayaan. Karena kuota pembiayaan ini terbatas, maka diprioritaskan kepada ibu-ibu yang belum pernah dan tidak sedang menerima pembiayaan lain dari lembaga keuangan lainnya, misalnya dari PT.PNM dan diprioritaskan yang memiliki hutang pada rentenir.
- 3) Setelah ta'mir menentukan ibu-ibu yang dinilai layak sebagai calon penerima pembiayaan Mawar Emas, maka ta'mir masjid tersebut membuat pengelompokan dan membagi ibu-ibu tersebut ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 20 (dua puluh) orang ibu-ibu dimana dalam setiap kelompok tersebut ada yang berperan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara.
- 4) Pihak ta'mir masjid menyerahkan daftar nama berikut semua persyaratan administratif yang sudah ditentukan pihak Bank NTB Syariah kepada MES NTB untuk mendapatkan surat rekomendasi kelayakan mendapat pembiayaan Mawar Emas;
- 5) Pihak ta'mir mengumpulkan jamaahnya yang sudah masuk daftar rekomendasi penerima pembiayaan, untuk menerima dan menyelesaikan proses pencairan pembiayaannya;
- 6) Ta'mir masjid menerima dan mengumpulkan setoran/cicilan mingguan dari setiap ketua kelompok pembiayaan Mawar Emas, yang kemudian nanti setiap bulannya

diserahkan kepada pegawai Bank NTB Syariah yang ditunjuk untuk wilayah tersebut.

- 7) Melakukan kegiatan mingguan secara rutin kepada para jamaahnya sekaligus sebagai ajang evaluasi dan monitoring serta waktu penyetoran cicilan mingguan.
- 8) Memastikan terlaksananya sistem tanggung renteng apabila ada anggota/jamaah yang tidak membayar cicilan mingguan karena alasan tertentu.

Walaupun dalam aturan yang dijelaskan oleh pihak Bank NTB Syariah bahwa cicilan diserahkan secara mingguan kepada ta'mir masjid, namun ada sebagian ta'mir yang tidak melaksanakan pengumpulan cicilan secara mingguan, tetapi lebih memilih secara bulanan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ta'mir masjid yang peneliti wawancarai:

Saya lebih memilih menerima setoran cicilan dari para jamaah Mawar Emas secara bulanan, walaupun sebenarnya diminta bersifat mingguan. Hal ini karena saya khawatir memegang uang jamaah selama 3 minggu sampai tiba minggu keempat untuk disetorkan kepada pihak Bank NTB Syariah. Akhirnya dengan musyawarah dengan kelompok jamaah Mawar Emas dan berdasarkan kesepakatan bersama, maka penyetoran cicilan dari jamaah kepada ta'mir dilakukan secara keseluruhan pada minggu keempat setiap bulannya sesuai waktu penyerahan dan penjemputan oleh pihak Bank NTB Syariah “

c) Bank NTB Syariah

Sebagai bagian terpenting dari proses pembiayaan Mawar Emas, Bank NTB Syariah tentu memiliki peran penting yaitu sebagai penyandang dana pembiayaan. Walaupun pembiayaan Mawar Emas berbasis akad *qard*, dimana bank tidak memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut, tetapi tetap saja, dana pembiayaan tersebut harus kembali ke bank. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah harus melakukan berbagai upaya dan strategi yang bertujuan untuk meminimalisir resiko sekaligus juga sebagai bagian dari mitigasi resiko. Beberapa langkah dan strategi yang dilakukan Bank NTB Syariah dan sekaligus menjadi bagian dari tugas Bank NTB dalam program pembiayaan Mawar Emas adalah :

- 1) Sosialisasi dan edukasi produk pembiayaan ultra mikro (Mawar Emas) ke para ta'mir masjid;
- 2) Membagikan form form yang dibutuhkan ke para ta'mir masjid (form pengajuan pembiayaan dan form pengajuan pembukaan rekening tabunganKu);
- 3) Melakukan koordinasi dengan para ta'mir untuk sosialisasi dan pengumpulan berkas dari jamaah;

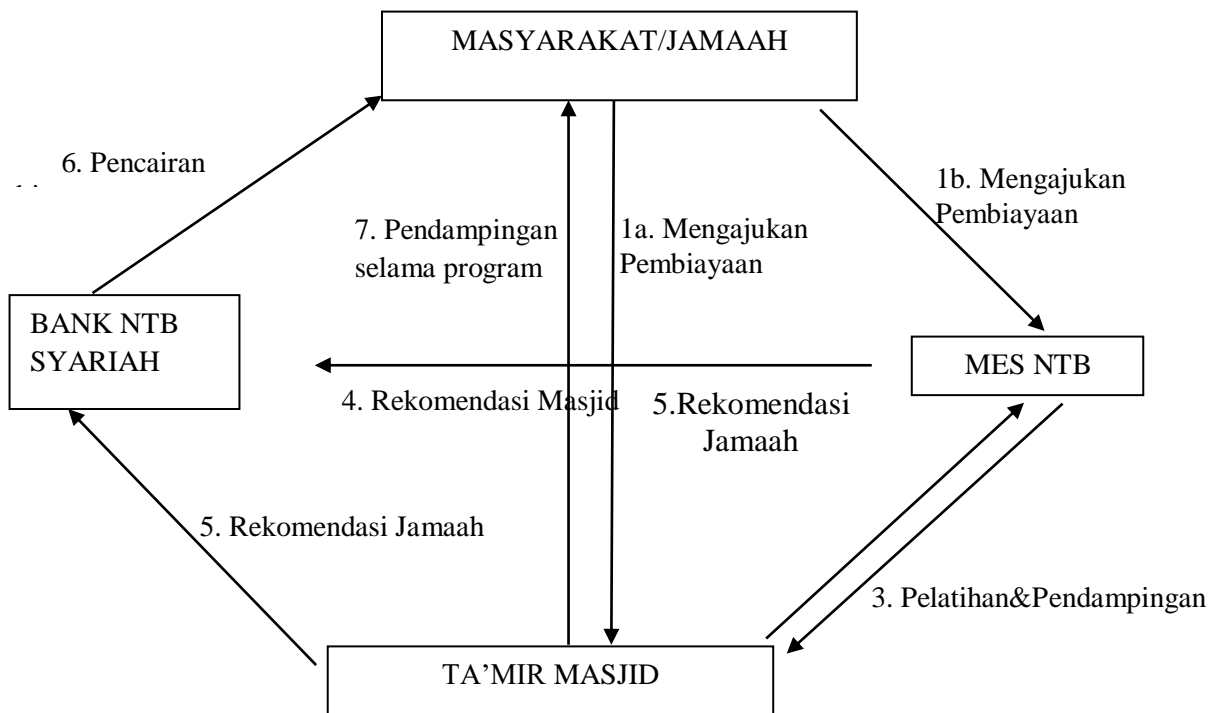
- 4) Melakukan analisa pembiayaan terhadap berkas permohonan. Hal ini mencakup pengecekan administrasi dan juga pengecekan SLIK OJK untuk menghindari terjadinya double pembiayaan. Artinya, apabila ada salah satu anggota kelompok tersebut sudah memperoleh pembiayaan lain, misalnya dari PNM, maka dia tidak boleh mendapatkan pembiayaan Mawar Emas dan diganti oleh jamaah yang lainnya.
- 5) Memberikan informasi atas hasil proses secara priodik kepada pihak MES NTB dan ta'mir masjid;
- 6) Menyiapkan draft perjanjian pembiayaan *qard}* Mawar Emas
- 7) Menerbitkan buku tabunganKu untuk setiap nasabah Mawar Emas
- 8) Memproses pencairan pembiayaan kepada ibu-ibu jamaah yang sudah lulus persyaratan dan memperoleh rekomendasi. Pencairan pembiayaan dilakukan di masjid yang menjadi sentral kegiatan jamaah di lokasi tersebut.
- 9) Menerima setoran cicilan nasabah setiap bulan dari ta'mir masjid

d) Jamaah Majid/ Pemohon

Sebagai pemohon, maka beberapa hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab jamaah masjid untuk dipenuhi supaya bisa memperoleh pembiayaan Mawar Emas adalah:

- 1) Mengajukan permohonan pembiayaan kepada ta'mir masjid nya masing-masing;
- 2) Menyiapkan dan menyerahkan persyaratan dokumen dan mengisi form permohonan pembiayaan dan permohonan pembukaan rekening tabungan;
- 3) Wajib menghadirkan pasangan/ orang tua saat proses pencairan dari pihak Bank NTB Syariah;
- 4) Penandatanganan akad kredit dengan pihak Bank NTB Syariah
- 5) Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan permohonan di awal;
- 6) Membayar kewajiban atas pembiayaan yang sudah diterima ke Bank NTB Syariah dengan cara mengangsur setiap minggunya kepada ta'mir masjid;
- 7) Bersedia menanggung resiko bersama (tanggung renteng) apabila ada anggota kelompok yang tidak mampu bayar/ lalai membayar cicilan.

Pola pembiayaan produk Mawar Emas Bank NTB Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Alur Proses Pembiayaan Mawar Emas

Di samping keterlibatan keempat elemen tersebut (MES NTB, Ta'mir Masjid, Bank NTB Syariah dan Jamaah Masjid), yang tidak kalah penting perannya dalam kesuksesan program pembiayaan Mawar Emas ini adalah OJK NTB dan juga Pemerintah Provinsi NTB. Keterlibatan ketiga lembaga ini adalah sebagai pembina dalam program Mawar Emas.

Abdul Mannan (2022) menjelaskan, bahwa OJK NTB sangat *concern* dalam mendukung pembumian ekonomi syariah di NTB. Sehingga setiap upaya yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat NTB, pasti didukung oleh OJK. Bentuk dukungan yang diberikan oleh OJK adalah dalam hal pembinaan dan pengawasan serta pemberian bantuan pembiayaan dalam proses pelatihan bagi ta'mir masjid.

Demikian juga halnya dengan pemerintah provinsi NTB. Pemprov NTB menjembantani dan memfasilitasi kelancaran program pembiayaan Mawar Emas karena tujuan mulia yang diembannya yaitu pemberantasan rentenir dan pemberdayaan masyarakat melalui masjid. Pemerintah provinsi NTB selalu membantu MES NTB dan mengkoordinasikan setiap kegiatan pelatihan ta'mir masjid yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Terkait dengan pemberdayaan masjid dan keterlibatan ta'mir dalam proses Mawar Emas, peneliti menanyakan bagaimana respon dan penilaian ta'mir terhadap model Mawar Emas dan manfaatnya terhadap masjid. Dari sampel yang peneliti tanya, semua ta'mir masjid

menyatakan bahwa mereka merasa sangat senang dengan adanya produk Mawar Emas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Pak Arif ta'mir masjid al Muhajirin Perampuan:

Sejauh yang saya dan teman-teman ta'mir rasakan, menurut saya, kegiatan pembiayaan Mawar Emas ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi jamaah yang mendapat bantuan modal usaha dan pelunasan hutang rentenir, tapi juga bermanfaat bagi kami sebagai ta'mir dan juga bagi masjid. Kalau bagi saya selaku ta'mir bermanfaat krn dapat ikut pelatihan dan dapat ilmu tentang tata kelola masjid, belajar ekonomi syariah, dan juga belajar mengelola keuangan jamaah. Sedangkan manfaat Mawar Emas bagi masjid, sejauh ini, masjid menjadi semarak dan lebih hidup karena jumlah anggota yang selalu hadir kajian mingguan lebih banyak dari biasanya (sebelum ada program Mawar Emas). Hal ini karena ada aturan kewajiban jamaah untuk hadir kajian dan setor cicilan setiap akhir kajian”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Samsuddin, ta'mir masjid al Ikhlas Mavilla Rengganis, menurut beliau:

Keberadaan program Mawar Emas sebenarnya lebih menguatkan keberadaan kajian yang memang sudah lama berjalan di masjid kami. Hanya saja, selama ini kegiatan kajian lebih banyak menyentuh aspek pembinaan akhlak, pendidikan dan keagamaan, belum pernah berbicara dan bahkan berbuat secara langsung terkait pembinaan ekonomi jamaah. Hadirnya program Mawar Emas semakin memperkuat eksistensi kelompok kajian jamaah dengan pemberdayaan ekonomi. Efek positifnya ke masjid adalah, jamaah menjadi semakin rajin beribadah, mengaji dan berbagi serta terlibat secara langsung dalam semua kegiatan masjid”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada paparan, analisa dan temuan data pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. peran Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kabupaten Lombok Barat cukup besar dirasakan bagi jamaahnya. Masjid berperan sebagai *lokus* kegiatan pemberdayaan dan pembinaan. Mulai dari pembinaan rohani, verifikasi jamaah, pencairan pembiayaan, tempat setoran hingga pembinaan-pembinaan lainnya. Hal ini memberikan bukti lain, bahwa selain sebagai tempat ibadah mahdah, ternyata masjid juga sangat bisa difungsikan sebagai sarana tempat pemberdayaan ekonomi ummat yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh jamaahnya. Hal ini terbukti dari peningkatan modal dan skala usaha yang dialami oleh para jamaah penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi melalui program Mawar Emas. Tetapi karena penerima manfaatnya masih sangat terbatas, hanya 5 (lima) masjid di wilayah kabupaten Lombok Barat, sehingga daya jangkau menjadi relatif kecil kalau dibandingkan dengan jumlah total masjid dan juga jumlah masyarakat muslim di wilayah Lombok Barat. Ke depannya diharapkan bank NTB Syariah menambah jumlah kucuran dana untuk program Mawar Emas dan juga diharapkan semakin banyak juga lembaga keuangan syariah lainnya yang ikut mengucurkan dana untuk program Mawar Emas sehingga semakin banyak jamaah yang bisa terjangkau.
2. Mekanisme dan Pola Pemberdayaan Ekonomi Ummat yang dilakukan Masjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah di Kabupaten Lombok Barat Dilakukan dengan kolaborasi dan kerjasama secara berjenjang dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut. Diawali dengan kerjasama antara bank NTB Syariah dengan MES NTB, MES NTB melakukan pelatihan dan pembinaan kepada takmir masjid, takmir masjid

melakukan sosialisasi dan proses verifikasi kepada jamaahnya, bank NTB Syariah datang ke masjid untuk melakukan proses pencairan pembiayaan, jamaah menyetor kepada ketua Kelompok- Takmir- bank NTB Syariah. Sera proses monitoring dan evaluasi dariu MES NTB dan bank NTB Syariah.

3. Model pemberdayaan ekonomi berbasis maasjid mitra Masyarakat Ekonomi Syariah di Kabupaten Lombok Barat ini merupakan inovasi baru yang dilakukan atas prakarasa dan kerjasama dari MES NTB, dan lembaga keuangan. Model ini harus terus dikembangkan karena mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang menjadi jamaahnya. Keterlibatan seluruh pihak dan juga mitigasi risiko yang baik akan membuat program pemberdayaan ini bisa lebih maju dan berkembang ke depannya.

B. Saran

1. Para takmir masjid diharapkan terus meningkatkan pemahaman dan literasinya terkait ekonomi syariah sehingga aspek kepercayaan masyarakat dan lembaga keuangan bisa terus meningkat.
4. Pihak MES NTB sebagai koordinator program diharapkan lebih berperan aktif lagi dalam melakukan pendampingan mingguan terhadap Ta'mir masjid untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap dana nasabah yang di *polling* selama 3 minggu di tangan Ta'mir. Komitmen tinggi lembaga pendamping (MES NTB dan Ta'mir Masjid) dalam melaksanakan tugas pendampingan mingguan menjadi kunci utama kesuksesan program pembiayaan ini.
2. Pihak Bank NTB Syariah diharapkan menjalin kerjasama dengan lebih banyak ormas lainnya untuk pengembangan program ini sehingga kemanfaatannya bagi masyarakat lebih bisa dirasakan secara merata. Di samping itu, untuk keberlanjutan program Mawar Emas, Bank NTB Syariah diharapkan mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih baik lagi untuk menekan angka NPF dan penyelewengan dana oleh Ta'mir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, (1993)
- Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendarai: Unhalu Press, 2011)
- Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012)
- Baali, Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun and Islamic Thought Style A Social Perspectif*, Terj. Manshuruddin dan Ahmadi Thaha, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Cholid, Narbuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung, Refika Aditama, 2017)
- Erziaty, Rozzana. Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Iqtishadiyah*, Volume II nomor II (2015).
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- , *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, IDEA 1998)
- Huda, Nor dan Abdul Kadir Saleh, *Islam Nusantara : Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: ar Ruzz Media, 2007.
- Hutomo, Mardi Yatmo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas, 2000.
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008)
- Jatman, D. dkk., " *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Semarang: Puskowajanti dan LIMPAD, 2001.
- Jim ife Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi : Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Khasanah, Utia dkk., Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (*J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*: Vol.3 Nomor 1 (Januari-Juni 2019).
- Maryani dedeh, Nainggolan ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta, penrbit Deepublish, Cet: Pertama, 2019

- Moelong, J Lexy . *Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006\.
- Mukhlisin, Ahmad dan Aan Suhendri, "Aplikasi Teori Sosiologi Dalam Pengembangan Masyarakat Islam". *Jurnal INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 2, No.2, (Desember, 2017).
- Rifa'I, Bachrun. *Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Rofiaty, *Inovasi dan Kinerja*. Malang: Universitas Brawijaya press, 2012.
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Sugiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2010.
- , *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharni, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 1. (2003).
- Suryanto, Asep dan Asep Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Iqtishaduna*, Volume 8, No.2, (Oktober, 2016).
- Sumantri, Rinol, "Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest". *Jurnal I-Economic*, Volume 3, No.2, (Desember, 2017).
- Sutarmadi, A. *Visi, Misi dan Langkah Strategis. Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*. Jakarta: Wacana Ilmu, 2001.
- Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Turama , Akhmad Rizqi, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons', *Eufoni: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, Volume 2, No. 2, (2018)
- Uha, Ismail Nawawi . *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: vivpress, 2013.
- , *Isu-Isu Ekonomi Islam*, buku ke 3. Jakarta: VIV Press.2014
- , *Keuangan Islam* .Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002

Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007)

-----, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Cet 1, 2013)